



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 188 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
YANG TERLAMBAT DAN BELUM MELAPORKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2019  
KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wajib LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN Tahun sebelumnya kepada KPK, setelah tanggal 31 Maret setiap tahun, ditetapkan sebagai Wajib LHKPN yang terlambat melaporkan LHKPN;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah menetapkan bahwa periode penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara diperpanjang selama 1 (satu) bulan;
- c. bahwa sesuai hasil rekapan, Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 30 April 2020 berjumlah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Terlambat Dan Belum Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2019 Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651); *u*

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 008);


**Memperhatikan :**

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

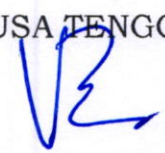
**KESATU**

: Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Yang Terlambat Dan Belum Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2019 Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. 


- KEDUA** : Wajib Lapori Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terlambat dan belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Wajib Lapori LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN kepada KPK-RI atau sampai dengan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagai Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menindaklanjuti pelaksanaan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 JUNI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiadi Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua KPK Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Wakil Gubernur NTT di Kupang;
6. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 18<sup>6</sup> /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 2 JUNI 2020

WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
YANG TERLAMBAT DAN BELUM MELAPORKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2019  
KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Maria N. Sadipun, SE	KPA pada UPTD Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan di Kupang pada Dinas PK	Belum lapor
2	Agustinus Gervasius, S.Pi	KPA pada UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang pada Dinas Sosial	Sudah lapor (terlambat)
3	Anton Pattipeilohy, SH	KPA pada UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra Dan Karya Wanita di Kupang pada Dinas Sosial	Belum lapor
4	R. R. Sulistyو Ambarsari, S.Sos, MM	KPA pada UPTD Latihan Kerja di Kupang pada Dinas KTKT	Sudah lapor (terlambat)
5	Agustinus R. Sigasare, ST	KPA pada UPTD Perijinan dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor	Sudah lapor (terlambat)
6	Muh Ikhwan, A.TD	KPA pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat	Belum lapor
7	Daniel I. Nggebu, SE	KPA pada UPTD Sarana Prasarana Olahraga pada Dispora	Belum lapor
8	Gabriel Gara Beni, SP	KPA pada UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sudah lapor (terlambat)
9	Sevrianus Seran Berek, S.Hut	KPA pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang	Belum lapor
10	Hendrikus F. Lako Rodja, S.Hut, M.Hut	KPA pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	Belum lapor
11	Maria Yofita Seran, S.Hut	KPA pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Malaka	Belum lapor
12	Yohanes Kewatung, S.Hut	KPA pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	Belum lapor
13	Marselus Ndeu, SP	KPA pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	Belum lapor
14	Drs. Mansuetus Tatus	KPA pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai	Belum lapor
15	Stefanus Nali, S.Hut	KPA pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	Belum lapor
16	Ir. Andumila Bala Kapita	KPA pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	Belum lapor

Ny

17	Antonius U.K.S. Kosi, S.Hut	KPA pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	Belum lapor
18	Rizhard N. A. Sanam, SE	KPA pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang	Sudah lapor (terlambat)
19	Dominggus Riwu, SE	KPA pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	Belum lapor
20	Dominikus Naif, SE	KPA pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu	Belum lapor
21	Clara Maria Fatima Bano, SE	KPA pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka	Sudah lapor (terlambat)
22	Paulus Lagan Golot, SE	KPA pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende	Belum lapor
23	Heronimus Ngatu, S.Sos	KPA pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada	Belum lapor
24	Yohanes Boro Hali, SE	KPA pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai	Belum lapor
25	Ir. Takem I. Radja Pono, M.Si	PPTK pada BPBD	Belum lapor
26	Agripa Kamengon, A.Md	PPBJ pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	Sudah lapor (terlambat)
27	Yansen Mbau	PPBJ pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	Belum lapor
28	Saul Samuel Lingga	PPBJ pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	Belum lapor
29	Yulexwanto M. Dengga, S.Sit	PPBJ pada Dinas Perhubungan	Sudah lapor (terlambat)
30	Yanti Y. Kana	PPBJP pada BPBD	Belum lapor
31	Ahasweros Pasutan	PPBJ pada Dinas PUPR	Belum lapor
32	Junita A. Lepez, ST	PPBJ pada Dinas PUPR	Belum lapor
33	Ramlah H. Nahrawi, SE, MM	PPBJ pada BPAD	Sudah lapor (terlambat)
34	Carlina Cerafica Melok, SE	PPBJ pada BPAD	Belum lapor
35	Ruben Raga Djara, S.Sos	PPBJP pada Biro Pemerintahan	Belum lapor
36	Intan, SE	PPBJP pada Dinas KTKT	Sudah lapor (terlambat)
37	Fruementius Dopo Puu, S.Sos	PPBJP pada Dinas Sosial	Belum lapor
38	Orlando Pereira, S.Sos	PPBJP pada Dinas Sosial	Sudah lapor (terlambat)
39	Frans B. Johannes, S.Sos, M.Si	Pokja PBJP pada BPBJ	Belum lapor
40	Veronika Adriana Johannis, SH	Pokja PBJP pada BPBJ	Sudah lapor (terlambat)
41	Yohanes Uwung	Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	Sudah lapor (terlambat)
42	Titus Jonson Solsepa, SE	Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	Sudah lapor (terlambat)
43	Ir. Stefaniah Fah, M.Si	PPK pada DPKP	Belum lapor
44	Rauschen R. Kolobani, SE, MM	PPK pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	Sudah lapor (terlambat)

45	Fiktor E. Batmalo, S.Sos, MM	PPK pada Dinas Kesehatan	Belum lapor
46	Ferdinandus Fahik, S.Sos	PPK pada Dinas Kominfo	Belum lapor
47	Tri Widodo, ST	PPK pada Dinas PUPR	Belum lapor
48	Frans Hendrik Mone, SE	PPK pada Dinas PUPR	Sudah lapor (terlambat)
49	Sumargijanto Di Hendrarubeda, ST, MT	PPK pada Dinas PUPR	Belum lapor
50	Afia Salama, STP	PPK pada DPKP	Belum lapor
51	Ir. Miqdonth S.Abolla, M.Si	PPK pada DPKP	Belum lapor
52	Ir. Agnes Palang Bolen	PPK pada DPKP	Belum lapor
53	Petra Yustina Saik, SP	PPK pada DPKP	Belum lapor
54	Lucky Laimeriwa, S.Hut	PPK pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama	Belum lapor
55	Ferry Eman Bessy, ST, MT	PPK pada DLHK	Belum lapor
56	Aloysia Ija Mukin, A.Md	Bendahara pada Dinas PK	Belum lapor
57	Wely Liliana Kadja, SE	Bendahara pada Dinas PUPR	Belum lapor
58	Nency Diany Maryon, SE	Bendahara pada Dinas PUPR	Belum lapor
59	Oktovianus Tiran, S.Sos	Bendahara pada Dinas Sosial	Belum lapor
60	Edeltrudis Neto, S.Sos	Bendahara pada Dinas Sosial	Sudah lapor (terlambat)
61	Apriyani Saleh, SE	Bendahara pada Dinas KTKT	Sudah lapor (terlambat)
62	Martha M. Ottu	Bendahara pada Dinas P3A	Belum lapor
63	Merpati Nalle, S.Sos	Bendahara pada Dinas Kesehatan	Sudah lapor (terlambat)
64	Martinus Sebastianus Sare	Bendahara pada DISPORA	Sudah lapor (terlambat)
65	Anna Sarlotha Messakh, SE	Bendahara pada DPKP	Belum lapor
66	Alexander P. Rosyen Welvaart	Bendahara pada DPKP	Sudah lapor (terlambat)
67	Asnat Rosalin Tabita Balukh, SP	Bendahara pada DPKP	Sudah lapor (terlambat)
68	Magdalena Y. Belaesili, A.Md	Bendahara pada DPKP	Sudah lapor (terlambat)
69	Edeltrudis Rifa	Bendahara pada DPKP	Sudah lapor (terlambat)
70	Adel Alpenina Liu	Bendahara pada DPKP	Sudah lapor (terlambat)
71	Johana Benny, SP	Bendahara pada DPKP	Sudah lapor (terlambat)
72	Angreni Marlinda Fanggidae	Bendahara pada DPKP	Sudah lapor (terlambat)
73	Kornelis Lagu	Bendahara pada DPKP	Belum lapor
74	Benny E. B. Foenay	Bendahara	Belum lapor
75	Albertho Tauk, SE	Bendahara pada Bappelitbangda	Sudah lapor (terlambat)
76	Lori Nelsim Sioh, S.Sos	Bendahara pada BPAD	Belum lapor

77	Mikhael J. Kuman, SE	Bendahara pada Biro Umum	Belum lapor
78	Johanis Watrimny, SH	Bendahara pada Biro Pemerintahan	Belum lapor
79	Marianus Yansenlinus, SE	Kasubag. Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada BKEUDA	Belum lapor
80	Dra. Fintje Ferderika Djami	Kasubag. PDE pada Dinas PUPR	Sudah lapor (terlambat)
81	Andry Santo Umbu Dangu, ST	Kasie Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi pada Dinas PUPR	Sudah lapor (terlambat)
82	Fransiscus Assisi Sulistyو Keban, ST, MT	Kasie Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas PUPR	Belum lapor
83	Markus T. Hermanoes, S.Pd	Kasie Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang pada Dinas PUPR	Belum lapor
84	Januarius Gustaf Leba, ST	Kasie Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas PUPR	Belum lapor
85	Ludfina A. E. Duli, ST	Kasie Penyediaan Sarana dan Prasarana Keciptakarya pada Dinas PUPR	Belum lapor
86	Dominikus Paulus Kolin, ST	Kasie Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas PUPR	Sudah lapor (terlambat)
87	Rinaldy Origenes Angka, S.Kom	PPBJ pada Dinas PUPR	Sudah lapor (terlambat)
88	Iwik Fanggi Tasik, SE	Kasubag. Keuangan pada Dinas PUPR	Belum lapor
89	Benyamin Nahak	Kabid. Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas PUPR	Sudah lapor (terlambat)
90	Pius Rasi	PPK pada Dinas PK	Sudah lapor (terlambat)
91	Laurensius L. Kleden, ST	PPK pada Dinas PERINDAG	Sudah lapor (terlambat)
92	Anesta M. Nesimnasi, SE, MM	PPK pada BKEUDA	Sudah lapor (terlambat)
93	Reynaldo Heronimus Lake	Bendahara pada Dinas Sosial	Sudah lapor (terlambat)
94	Maria Rosina Un	Bendahara pada Dinas Kesehatan	Sudah lapor (terlambat)
95	Only Ivonila Riwu	Bendahara pada Dinas Kesehatan	Sudah lapor (terlambat)

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

24